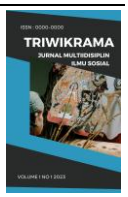
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN: STUDI KASUS DPRD KOTA BANDUNG 2025

Natashya Rizkia Putri Mustari, Gabriella Putri Kezia Hutasoit, Gloria Stevanie Nauli Sianipar, Angelina Qur'ainny, Yayan Nuryanto

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
natashya23001@mail.unpad.ac.id,
gabriella23009@mail.unpad.ac.id,
gloria23001@mail.unpad.ac.id,
angelina23002@mail.unpad.ac.id,
yayan.nuryanto@unpad.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi pemerintahan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tahun 2025 dengan menitikberatkan pada interaksi kelembagaan antara aktor politik dan birokrasi legislatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang memadukan kajian pustaka dan wawancara semi-terstruktur terhadap pejabat teknis di Sekretariat DPRD. Kerangka analisis mengacu pada teori komunikasi organisasi Pace dan Faules yang menekankan unsur kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, komunikasi ke atas, pengambilan keputusan partisipatif, serta orientasi sasaran kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi di DPRD Kota Bandung terbentuk melalui interaksi vertikal dan horizontal yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, dinamika politik fraksi, serta peran strategis Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung administratif. Komunikasi vertikal sangat bergantung pada stabilitas kepercayaan dan kejelasan alur instruksi, sementara komunikasi horizontal menjadi ruang utama deliberasi, negosiasi, dan pembentukan keputusan partisipatif lintas komisi dan fraksi. Pemanfaatan teknologi informasi turut mempercepat arus komunikasi, namun juga menghadirkan tantangan berupa asimetri informasi dan overload pesan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja DPRD sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola pola komunikasi yang adaptif, terbuka, dan kolaboratif dalam konteks relasi politik dan birokrasi pemerintahan daerah.

Kata kunci: komunikasi pemerintahan; DPRD Kota Bandung; komunikasi organisasi; hubungan kelembagaan; pengambilan keputusan partisipatif.

Abstract

This study aims to analyze governmental communication patterns within the Regional House of Representatives (DPRD) of Bandung City in 2025, with particular emphasis on institutional interactions between political actors and legislative bureaucracy. The research employs a qualitative descriptive approach using a case study method, combining literature review and semi-structured interviews with technical officials of the DPRD Secretariat. The analytical framework is based on Pace and Faules' organizational communication theory, focusing on trust, openness, honesty, upward communication, participatory decision-making, and performance-oriented communication. The findings reveal that communication patterns in the Bandung City DPRD are shaped through both vertical and horizontal interactions influenced by institutional structures, factional political dynamics, and the strategic role of the DPRD Secretariat as an administrative supporting system. Vertical communication relies heavily on trust and clarity of instruction, while horizontal communication functions as the main arena for deliberation, negotiation, and participatory decision-making across commissions and factions. The use of information technology accelerates communication flows but also generates challenges such as information asymmetry and message overload. This study concludes that the effectiveness of the DPRD's institutional performance largely depends on its capacity to manage adaptive, open, and collaborative communication patterns within the complex interplay of political and bureaucratic relations in local governance.

Keywords: governmental communication; Bandung City DPRD; organizational communication; institutional relations; participatory decision-making.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada efektivitas komunikasi internal yang terbuka, terkoordinasi, dan adaptif. Namun, sebagai organisasi politik-birokratik yang terdiri dari berbagai fraksi dan alat kelengkapan dewan, DPRD menghadapi dinamika komunikasi yang kompleks. Perbedaan kepentingan politik, struktur hierarkis, serta peran Sekretariat Dewan (Setwan) sebagai sistem pendukung sering kali memunculkan hambatan komunikasi. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan, sinkronisasi kebijakan, dan kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, kajian mengenai pola komunikasi internal DPRD Kota Bandung menjadi penting untuk memahami bagaimana tata kelola dan kinerja lembaga dapat ditingkatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Komunikasi Organisasi Pemerintahan (Pace & Faules)

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam iklim komunikasi organisasi karena memengaruhi penerimaan dan interpretasi pesan. Dalam konteks DPRD, kepercayaan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kelembagaan, mencakup integritas, konsistensi, dan orientasi pada tujuan bersama. Kepercayaan yang kuat mendorong komunikasi yang terbuka, kolaboratif, serta memperlancar koordinasi dan pengambilan keputusan, sementara lemahnya kepercayaan berpotensi menimbulkan resistensi dan fragmentasi internal.

Pengambilan Keputusan Partisipatif

Pengambilan keputusan partisipatif mencerminkan iklim komunikasi yang sehat karena melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan kebijakan. Partisipasi memungkinkan pertukaran gagasan lintas-level sehingga keputusan menjadi lebih komprehensif dan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Dalam DPRD, pola komunikasi partisipatif memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan komitmen terhadap implementasi keputusan kelembagaan.

Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam komunikasi organisasi yang mendorong transparansi dan mengurangi kesalahpahaman. Dalam lingkungan DPRD, kejujuran dalam penyampaian informasi, data, dan pertimbangan kebijakan mendukung akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kejujuran juga berperan dalam membentuk budaya organisasi yang berintegritas dan kolaboratif.

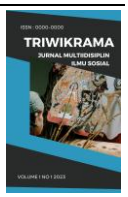
Keterbukaan Berkomunikasi

Keterbukaan memungkinkan aliran informasi yang jelas dan dua arah antar anggota organisasi. Prinsip ini membantu mengurangi ketidakpastian, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan tujuan dan peran kelembagaan. Dalam DPRD, keterbukaan komunikasi mendukung praktik umpan balik konstruktif dan memperkuat kohesi kerja dalam pengambilan keputusan publik.

Dukungan terhadap Komunikasi ke Atas

Dukungan terhadap komunikasi ke atas menciptakan rasa aman bagi bawahan untuk menyampaikan laporan, saran, dan kritik kepada pimpinan. Pola ini memungkinkan pimpinan memperoleh informasi faktual dari tingkat pelaksana sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan responsif. Dalam DPRD, komunikasi ke atas yang didukung secara institusional memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kinerja kelembagaan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Pertimbangan Sasaran Kinerja Tinggi

Penetapan sasaran kinerja yang jelas dan terukur menjadi instrumen penting dalam membangun iklim komunikasi yang berorientasi hasil. Sasaran yang dikomunikasikan secara konsisten membantu menyelaraskan tindakan individu dan unit kerja. Dalam DPRD, kejelasan tujuan mendukung koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja secara akuntabel, sekaligus memperkuat efektivitas organisasi pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan kajian literatur dan studi lapangan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami proses hingga dampak dari pola komunikasi di DPRD Kota Bandung.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman teoritis mengenai pola komunikasi dan menerapkannya dalam konteks empiris melalui studi kasus di DPRD Kota Bandung.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian berada di DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. DPRD Kota Bandung dipilih karena memiliki dinamika komunikasi pemerintahan yang kompleks, melibatkan interaksi antara pimpinan dewan, anggota fraksi dan komisi, serta Sekretariat DPRD. Informan utama dalam penelitian ini adalah Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Keuangan dan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Penganggaran dan Pengawasan. yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan komunikasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

a. Kajian pustaka, yang mencakup penelusuran terhadap literatur utama seperti buku Komunikasi Organisasi karya Pace dan Faules, peraturan perundang-undangan terkait DPRD dan pemerintahan daerah, serta artikel ilmiah yang membahas komunikasi pemerintahan.
b. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Keuangan dan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Penganggaran dan Pengawasan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pola komunikasi internal, proses negosiasi, serta interaksi antara aktor politik dan birokrasi dalam perumusan kebijakan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi:

a. Reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan,
b. Penyajian data dalam bentuk narasi tematik yang terstruktur, dan
c. Penarikan kesimpulan, dengan mengaitkan hasil temuan penelitian pada teori komunikasi organisasi Pace dan Faules sebagai landasan analisis pola komunikasi pemerintahan di DPRD Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung

Sekretariat DPRD Kota Bandung secara keseluruhan bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD, dan menyediakan/menyelaraskan tenaga ahli bila diperlukan. Sekretaris DPRD memimpin sekretariat, bertanggung jawab secara teknis terhadap pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah termasuk perumusan visi-misi, rencana strategis, koordinasi internal, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

1. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan memiliki tugas utama mendukung pelaksanaan fungsi legislatif DPRD, terutama urusan penyelenggaraan persidangan, rapat, risalah, serta penyusunan, pengadministrasian dan dokumentasi produk hukum. Bagian ini membantu DPRD agar proses legislasi, rapat, pembuatan peraturan dan dokumentasi hukum berjalan efektif sesuai prosedur.
2. Bagian Umum bertugas sebagai penanggungjawab tata usaha, administrasi harian, kepegawaian, perlengkapan, dan logistik sekretariat. Bagian ini menyusun rencana kerja, petunjuk teknis tata usaha dan rumah tangga, serta menjalankan layanan administratif dan operasional sehari-hari untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat dan DPRD secara umum.
3. Bagian Program dan Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan program, penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan sekretariat dan DPRD. Bagian ini memastikan bahwa anggaran DPRD dikelola dengan akuntabel dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan DPRD sesuai rencana kerja.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki fungsi mendukung tugas DPRD dalam aspek penganggaran dan pengawasan, yakni memfasilitasi kegiatan DPRD terkait budget, pemantauan pelaksanaan anggaran daerah, dan pengawasan pelaksanaan program/ kebijakan. Bagian ini membantu DPRD memenuhi fungsi kontrol serta pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Struktur Organisasi Komisi DPRD Kota Bandung

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat kota. Karena cakupan urusan pemerintahan daerah sangat luas, DPRD membentuk sejumlah komisi yakni kelompok kerja spesialis agar pembahasan kebijakan, evaluasi, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih fokus dan efisien sesuai bidangnya.

Di Kota Bandung periode 2024–2029, DPRD membentuk empat komisi: Komisi I, II, III, dan IV. Setiap komisi memiliki bidang tugas dan tanggung-jawab spesifik. Berikut uraian tugas dan tupoksinya berdasarkan bidang masing-masing.

1. Komisi I DPRD Kota Bandung Bidang Pemerintahan dan Hukum

   Ruang lingkup bidang: Hukum, perundang-undangan, Hak Asasi Manusia; Pemerintahan; Ketentraman & Ketertiban; Kependudukan & Transmigrasi; Komunikasi & Informasi; Aparatur & kelembagaan; Perizinan; Sosial politik; Organisasi kemasyarakatan; Pertanahan & aset; Kerja sama daerah; Arsip daerah & pengelolaan data-elektronik.

   Tugas dan fungsi utama meliputi:
   - Membahas dan memberi masukan atas rancangan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, hukum, perizinan, pertanahan, hak asasi manusia, dan regulasi kelembagaan.
   - Mengawal pelaksanaan regulasi tersebut oleh Pemerintah Kota Bandung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan.
   - Mengawasi aspek administrasi pemerintahan, termasuk kelembagaan, aparatur, sistem informasi pemerintahan, dan data-elektronik.
   - Menangani isu ketertiban umum, keamanan, kependudukan, serta kerja sama daerah dan organisasi kemasyarakatan.
   - Menampung aspirasi atau keluhan masyarakat terkait hak asasi, hukum, pelayanan perizinan, dan regulasi pemerintahan.

Dengan demikian, Komisi I menjadi rujukan dalam hal regulasi, hukum, tata kelola pemerintahan, dan aspek kelembagaan serta ketertiban di Kota Bandung.

2. Komisi II DPRD Kota Bandung Bidang Ekonomi, Perindustrian & Perekonomian Daerah (Perdagangan & Perindustrian, PK-UKM, Koperasi, Investasi, dsb).

   Walaupun laman resmi Komisi II DPRD Kota Bandung sempat tidak termuat (timeout saat pengambilan data), struktur umum komisi B (bidang ekonomi/perindustrian) dalam DPRD termasuk DPRD Kota Bandung umumnya mencakup urusan seperti: perdagangan & perindustrian, koperasi & usaha kecil menengah, perbankan/perusahaan daerah, investasi, keuangan daerah, pendapatan asli daerah, pengadaan pangan, sektor usaha & investasi.

   Tugas dan fungsi utama:
   - Membahas kebijakan daerah terkait ekonomi dan pembangunan ekonomi: termasuk perdagangan lokal, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah (UKM), investasi dan penanaman modal.
   - Meninjau dan memberi rekomendasi terhadap kebijakan pendapatan daerah, PAD, perbankan daerah, dan perusahaan milik daerah yang berkaitan dengan sektor ekonomi/perindustrian.
   - Mengawasi pelaksanaan program ekonomi, industri, koperasi, investasi, agar selaras dengan rencana pembangunan dan regulasi daerah.
   - Menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha, mengidentifikasi kendala dalam sektor ekonomi— seraya merumuskan solusi berupa kebijakan, regulasi, atau rekomendasi program.
   - Mendorong perkembangan ekonomi lokal dan daya saing kota, melalui sinergi dengan pemerintah kota dan pemangku kepentingan di sektor ekonomi.

3. Komisi III DPRD Kota Bandung Bidang Pembangunan dan Infrastruktur / Pekerjaan Umum

   Sama seperti Komisi II, data laman Komisi III juga sempat tidak berhasil dimuat; namun berdasarkan pola pembagian komisi pada DPRD daerah (dan dokumentasi internal DPRD Kota Bandung), Komisi C/Komisi III biasanya menangani urusan pembangunan, pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam, perumahan, dan sektor pembangunan lainnya.

   Tugas dan fungsi utama:
   - Membahas dan merumuskan kebijakan pembangunan fisik kota: termasuk infrastruktur, tata ruang, perumahan, utilitas, lingkungan hidup, dan perencanaan kota.
   - Mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan, pekerjaan umum, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan rencana — serta memperhatikan aspek keberlanjutan, kerapihan, dan kebutuhan warga.
   - Memberi rekomendasi terkait prioritas pembangunan, penggunaan anggaran pembangunan, dan kebijakan pembangunan jangka menengah / panjang.
   - Menyaring aspirasi warga terkait kebutuhan pembangunan, perumahan, tata ruang, lingkungan hidup, serta menyalurkan ke pemerintah kota untuk ditindaklanjuti.
   - Membantu memastikan pembangunan kota berjalan transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan umum.

4. Komisi IV DPRD Kota Bandung Bidang Kesejahteraan Rakyat

   Ruang lingkup bidang: Pendidikan; Kesehatan; Keluarga Berencana; Ketenagakerjaan; Pemuda & Olahraga; Agama; Kebudayaan; Sosial; Pemberdayaan perempuan; Penanggulangan HIV/AIDS & narkotika; Perpustakaan; Penanggulangan bencana.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tugas dan fungsi utama:

- Membahas kebijakan dan regulasi daerah di sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, sosial serta kebijakan kesejahteraan masyarakat.
- Mengawasi pelaksanaan program pemerintah kota di bidang kesehatan, pendidikan, KB, ketenagakerjaan, olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan, penanggulangan masalah sosial seperti narkotika dan HIV/AIDS, serta layanan perpustakaan dan kebudayaan.
- Menampung aspirasi warga terkait kebutuhan dasar, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, olahraga, dan isu-isu kesejahteraan.
- Memberi masukan dan rekomendasi kebijakan agar program kesejahteraan lebih efektif, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Berperan dalam pengawasan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan isu-isu sosial sensitif (kesehatan, narkotika) untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan warga.

Keempat komisi di atas, secara kolektif, menjalankan tiga fungsi utama dari DPRD: legislasi (pembahasan dan pembuatan regulasi/perda), anggaran (pembahasan & pengawasan anggaran daerah), dan pengawasan (*oversight* terhadap pelaksanaan kebijakan & program pemerintah daerah). Pembagian tugas berdasarkan bidang memungkinkan DPRD untuk bekerja dengan lebih fokus, mendalam, dan efisien serta memudahkan koordinasi dengan perangkat daerah (OPD) yang relevan.

Pola Hubungan Kelembagaan

Pola hubungan kelembagaan pada dasarnya menggambarkan bagaimana struktur, norma, dan peran dalam sebuah organisasi membentuk kerangka formal interaksi antara pimpinan dan anggota. Kelembagaan bukan hanya susunan jabatan, tetapi juga mencakup pedoman perilaku, mekanisme koordinasi, dan sistem kerja yang mengatur bagaimana setiap individu menjalankan fungsi organisasional. Dalam hubungan antara pimpinan dan anggota tidak bisa dipahami hanya sebagai relasi hierarkis, tetapi sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang menuntut keteraturan, kejelasan wewenang, dan keselarasan tujuan bersama. Struktur kelembagaan atah organisasi memberi arah bagaimana komunikasi, pengambilan keputusan, dan distribusi tugas harus dilakukan dalam organisasi.

Namun struktur kelembagaan tersebut hanya akan berfungsi optimal jika didukung oleh kualitas relasi yang baik antara pimpinan dan anggota. Berdasarkan temuan dalam penelitian terdahulu dalam Repository Universitas Islam Riau, komunikasi organisasi yang efektif baik vertikal maupun horizontal menjadi fondasi terbentuknya kerja sama, rasa kekeluargaan, dan hubungan saling percaya dalam organisasi. Kejelasan instruksi, keterbukaan komunikasi, serta responsivitas pimpinan terhadap anggota terbukti meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Di sinilah teori hubungan pemimpin–anggota (*Leader–Member Exchange/LMX*) relevan: semakin tinggi kualitas pertukaran dan kepercayaan antara pimpinan dan anggota, semakin kuat pula kinerja dan kohesi organisasi.

Dengan demikian, relasi pimpinan dan anggota menjadi jembatan yang menghubungkan struktur kelembagaan dengan efektivitas operasional organisasi. Kelembagaan menyediakan kerangka formal, tetapi relasi interpersonal menghidupkan kerangka tersebut melalui interaksi, kolaborasi, dan komunikasi yang konstruktif. Dalam lembaga legislatif, pola hubungan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Sekretariat DPRD (Setwan) berperan sebagai unsur pelayanan teknis dan administratif bagi DPRD, sementara DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hubungan Setwan–DPRD menuntut koordinasi yang harmonis: Setwan harus memahami kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD dalam penyediaan data, dukungan rapat, penyusunan naskah akademik, hingga fasilitasi komunikasi publik, sementara

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

DPRD membutuhkan Setwan yang responsif, profesional, dan netral secara birokratis. Karena itu, efektivitas hubungan antara Setwan dan DPRD bergantung pada sejauh mana komunikasi, kepercayaan, dan keselarasan peran antara keduanya dapat terbangun dengan baik.

1. Hubungan Horizontal

   Pola hubungan kelembagaan DPRD Kota Bandung merupakan struktur interaksi yang terbentuk antara aktor politik (pimpinan dan anggota DPRD) dengan aktor birokratis (Sekretariat DPRD/Setwan) melalui mekanisme komunikasi formal, informal, vertikal, horizontal, dan digital. Hubungan ini tidak hanya dipengaruhi oleh tata organisasi formal, tetapi juga oleh dinamika politik, budaya kerja, ego sektoral, serta mekanisme teknokratis yang dijalankan Setwan.

   Hubungan horizontal di DPRD Kota Bandung berlangsung melalui mekanisme deliberasi, koordinasi, dan negosiasi antaranggota dalam komisi maupun lintas fraksi. Hubungan ini memperlihatkan bahwa DPRD tidak bekerja semata-mata berdasarkan struktur formal, tetapi juga melalui jejaring politik yang dinamis dan interaksi fungsional antarunit organisasi. Komunikasi horizontal menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan perspektif politik, mempertukarkan informasi substantif, serta membahas isu kebijakan secara kolektif. Selain itu, hubungan horizontal melibatkan peran Setwan sebagai perangkat birokratis yang mendukung kelancaran rapat, penyusunan dokumen, dan koordinasi teknis sehingga proses komunikasi antarpelaku organisasi dapat berjalan efektif.

   Pola hubungan kelembagaan DPRD–Setwan memperlihatkan karakter *supporting system* yang saling bergantung. DPRD membutuhkan dukungan teknis, administratif, dan dokumentatif dari Setwan untuk menjalankan fungsi politiknya, sementara Setwan membutuhkan arahan dan keputusan formal DPRD untuk menggerakkan proses birokrasi. Relasi ini menuntut keterbukaan informasi, transparansi dokumen, serta mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui surat-menyurat, notulensi, dan rapat resmi. Namun demikian, hubungan ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal seperti perbedaan kepentingan fraksi, sensitivitas isu kebijakan, serta pengaruh budaya organisasi yang dapat menimbulkan ego sektoral. Karena itu, pola hubungan kelembagaan DPRD Kota Bandung bersifat adaptif: ia tersusun secara formal melalui struktur organisasi, tetapi digerakkan secara fleksibel melalui komunikasi informal, koordinasi personal, dan interaksi lintas level yang memungkinkan proses politik dan birokrasi berjalan beriringan.

2. Hubungan Vertikal

   Hubungan vertikal dalam kelembagaan DPRD Kota Bandung menunjukkan pola interaksi yang berlangsung dari tingkat pimpinan politik hingga unit birokrasi teknis di Sekretariat DPRD. Pola ini bergerak dari pimpinan DPRD yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, serta unsur fraksi kepada Sekretaris DPRD (Setwan) sebagai kepala perangkat administratif, kemudian turun ke kepala bagian, kepala subbagian, dan staf pelaksana. Hubungan vertikal ini berfungsi memastikan bahwa keputusan politik yang dibuat di level pimpinan dapat diterjemahkan secara tepat menjadi instruksi operasional, dokumen administratif, serta langkah kerja yang dapat diimplementasikan secara teknis di lingkungan Setwan. Mekanisme tersebut berjalan melalui alur formal seperti surat-menyurat, disposisi, rapat internal, serta penyampaian arahan resmi, sehingga setiap pesan yang berasal dari pimpinan memiliki legitimasi struktural dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas.

   Dalam struktur vertikal ini, Setwan memegang posisi strategis karena berperan menghubungkan kepentingan politik dan kebutuhan administratif lembaga. Pada level ini, Sekwan tidak hanya menjadi penerus instruksi dari pimpinan DPRD, tetapi juga

bertindak sebagai filter dan penafsir kebijakan agar setiap arahan dapat disesuaikan dengan kapasitas birokrasi dan ketentuan peraturan. Kepala bagian dan kepala subbagian kemudian menerjemahkan arahan tersebut menjadi rencana kerja, langkah teknis, dan pembagian tugas kepada staf, sehingga terjadi kesinambungan antara arahan strategis dan pelaksanaan operasional. Dengan demikian, hubungan vertikal berfungsi menjaga konsistensi antara proses legislatif dengan dukungan administratif, sekaligus memastikan bahwa aliran informasi dari pimpinan ke bawah berjalan jelas, terstruktur, dan selaras dengan prosedur kelembagaan.

Selain memperkuat kesinambungan kerja internal, hubungan vertikal ini juga membentuk pola kontrol dan evaluasi yang terintegrasi. Pimpinan DPRD menyampaikan kebutuhan dan arah kebijakan, Setwan memfasilitasi penyelarasan administratif, sementara bagian dan subbagian melaksanakan serta melaporkan proses kerja secara berjenjang. Pola ini memungkinkan DPRD menjaga akuntabilitas internal, mengurangi distorsi informasi, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas kelembagaan berjalan sesuai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, hubungan vertikal di DPRD Kota Bandung bukan sekadar struktur hierarkis, tetapi mekanisme koordinatif yang menjamin keterhubungan antara kepemimpinan politik dengan pelaksanaan tugas teknokratis di lingkungan Sekretariat DPRD.

Kepercayaan dalam Komunikasi Vertikal

Kepercayaan merupakan unsur fundamental dalam komunikasi vertikal organisasi, khususnya pada lembaga legislatif yang beroperasi dalam struktur politik dan birokrasi yang kompleks seperti DPRD. Dalam kerangka teori komunikasi organisasi Pace dan Faules, kepercayaan menentukan sejauh mana instruksi dapat diterima secara konstruktif, umpan balik dapat disampaikan secara terbuka, serta koordinasi dapat berlangsung tanpa hambatan psikologis maupun institusional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi vertikal di DPRD Kota Bandung sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor internal dalam membangun relasi kerja yang dilandasi kepercayaan, meskipun berada dalam struktur hierarkis yang ketat.

Secara struktural, komunikasi vertikal di DPRD Kota Bandung berlangsung melalui jalur instruksional, koordinatif, dan pengawasan yang berjenjang, mulai dari pimpinan DPRD, Sekretaris Dewan, kepala bagian, kepala subbagian, hingga staf teknis. Pola ini menempatkan konsistensi pesan dan kejelasan penafsiran sebagai faktor kunci keberhasilan komunikasi. Dalam praktiknya, kepala bagian dan kepala subbagian memegang posisi strategis sebagai perantara kebijakan, berperan menafsirkan arahan pimpinan agar dapat dioperasionalkan sesuai dengan kondisi teknis lapangan. Ketepatan penafsiran pada level ini berpengaruh langsung terhadap sinkronisasi kinerja lintas bagian.

Kepercayaan dalam komunikasi vertikal juga tercermin dalam mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi, evaluasi berkala, dan pelaporan kinerja. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol administratif, tetapi juga sebagai ruang klarifikasi dan penyelarasan informasi antar level organisasi. Namun demikian, temuan lapangan mengindikasikan adanya kecenderungan asimetri pengetahuan, terutama ketika pengambilan keputusan pada level pimpinan lebih didominasi oleh pertimbangan kebijakan dibandingkan pemahaman teknis lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan melemahkan kepercayaan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan responsif.

Tantangan dalam membangun kepercayaan pada komunikasi vertikal DPRD bersumber dari faktor struktural dan relasional. Perbedaan kepentingan politik mendorong sikap kehati-hatian pegawai dalam menyampaikan informasi sensitif, sementara dominasi senioritas dan ego

sektoral berpotensi menghambat keberanian staf untuk menyampaikan pandangan secara langsung. Selain itu, ketimpangan akses informasi antarlevel struktural memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis, sehingga meningkatkan risiko miskomunikasi dan menurunkan kualitas koordinasi organisasi.

Meskipun demikian, upaya penguatan kepercayaan tetap dilakukan melalui pendekatan komunikasi interpersonal dan informal, seperti diskusi langsung dan interaksi non-formal antaraktor kelembagaan. Praktik ini berfungsi mengurangi jarak hierarkis dan membuka ruang pertukaran informasi yang lebih substantif. Secara keseluruhan, kepercayaan dalam komunikasi vertikal DPRD Kota Bandung tidak hanya berfungsi sebagai kualitas hubungan interpersonal, tetapi sebagai prasyarat institusional yang menentukan efektivitas koordinasi, ketepatan alur instruksi, serta kualitas pengawasan. Stabilitas relasi vertikal yang dilandasi kepercayaan memungkinkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara lebih terstruktur, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika internal lembaga.

Keputusan Partisipatif dalam Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal di DPRD Kota Bandung berperan sebagai fondasi utama dalam proses deliberatif dan pengambilan keputusan partisipatif. Interaksi antaranggota komisi, lintas fraksi, serta hubungan antara DPRD dan Setwan membentuk mekanisme koordinasi yang mengintegrasikan kepentingan politik dan teknokratis. Pada tingkat komisi, komunikasi berlangsung dua arah dan relatif egaliter, di mana staf pendukung memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa dibatasi hierarki formal. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya bersumber dari otoritas politik, tetapi juga dari kolaborasi fungsional.

Sementara itu, komunikasi lintas fraksi memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh orientasi politik partai. Proses ini berlangsung melalui forum formal dan jejaring informal yang berfungsi sebagai ruang negosiasi kepentingan. Dinamika politik, ego sektoral, serta sensitivitas antaraktor menjadi faktor penentu efektivitas komunikasi horizontal. Dalam konteks ini, Setwan berperan penting sebagai mediator yang menjembatani alur komunikasi antarfraksi, komisi, dan pimpinan dewan. Keputusan partisipatif pada akhirnya merupakan hasil interaksi multi-jalur yang memadukan mekanisme formal, informal, teknis-administratif, dan politik.

Kejujuran dan Negosiasi dalam Proses Perumusan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan di DPRD Kota Bandung menunjukkan bahwa kejujuran dan negosiasi merupakan elemen kunci dalam komunikasi politik dan birokrasi legislatif. Dalam rapat paripurna, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum secara strategis namun tetap menjaga kejujuran dalam merepresentasikan aspirasi publik, sehingga keputusan Raperda memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun sosial. Pada tingkat komisi, komunikasi berlangsung lebih mendalam dan fleksibel, ditandai dengan negosiasi intens antara anggota dewan dan sekretariat dalam membahas substansi Raperda serta pokok-pokok pikiran, termasuk pengakuan atas keterbatasan anggaran dan kapasitas implementasi kebijakan.

Dalam proses penyusunan Raperda melalui komisi dan panitia khusus, kejujuran dan negosiasi berpadu sebagai strategi komunikasi utama. Negosiasi internal mencakup pembahasan teknis, dampak fiskal, serta potensi resistensi publik dan eksekutif, sementara kejujuran tercermin dalam pengakuan kelemahan draf dan kebutuhan revisi untuk mencapai kesepakatan bersama. Pokok-pokok pikiran anggota DPRD menjadi arena komunikasi strategis, di mana aspirasi konstituen dinegosiasikan agar selaras dengan RKPD dan prioritas pembangunan daerah, sering kali melalui lobi lintas fraksi.

Negosiasi politik di DPRD Kota Bandung berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Kejujuran dalam penyampaian tujuan

kebijakan menjadi prasyarat bagi terciptanya konsensus lintas fraksi dan hubungan yang konstruktif dengan eksekutif. Integrasi kejujuran dan negosiasi ini menunjukkan kematangan komunikasi internal DPRD, yang berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang realistis, aspiratif, serta mampu menjaga legitimasi publik dan efektivitas lembaga legislatif dalam jangka panjang.

Keterbukaan Komunikasi dalam Hubungan DPRD-Setwan

Keterbukaan komunikasi antara DPRD dan Setwan menjadi prasyarat penting bagi akuntabilitas dan efektivitas kerja legislatif. Setwan berfungsi sebagai supporting system yang menyediakan dukungan administratif, teknis, dan dokumentatif bagi pelaksanaan tugas DPRD. Mekanisme formal seperti surat-menyurat, notulensi, dan dokumentasi rapat menjadi instrumen utama dalam menjaga transparansi internal dan jejak kebijakan.

Namun demikian, hubungan komunikasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain birokrasi berjenjang, ego sektoral antarbagian, ketidaksinkronan antara dokumen teknis dan arahan politik, serta keterbatasan akses staf terhadap anggota dewan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural dalam organisasi DPRD.

Dukungan Teknologi dalam Komunikasi ke Atas

Pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), aplikasi pesan instan (WhatsApp), dan e-office berkontribusi signifikan dalam mendukung komunikasi ke atas di DPRD Kota Bandung. SIPD berfungsi sebagai sistem komunikasi struktural yang terdokumentasi dan terstandarisasi, sementara WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi cepat dan fleksibel. E-office mendukung efisiensi administrasi, transparansi internal, dan akuntabilitas kelembagaan melalui digitalisasi dokumen dan notulensi.

Meski demikian, penggunaan teknologi juga menimbulkan tantangan berupa overload informasi, kesenjangan literasi digital, respon yang tidak merata, serta ketergantungan pada mekanisme hierarkis. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas komunikasi. Diperlukan penguatan kapasitas digital, penataan standar operasional komunikasi, serta integrasi antara mekanisme formal dan digital agar komunikasi ke atas dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Orientasi Sasaran Kinerja dan Budaya Politik dalam Komunikasi

Orientasi sasaran kinerja dan budaya politik di DPRD Kota Bandung membentuk pola komunikasi internal yang khas dan sangat dipengaruhi oleh praktik patronase. Struktur komunikasi yang hierarkis menempatkan Sekretaris DPRD, kepala bagian, dan ketua tim sebagai aktor sentral dalam mengarahkan alur pesan sebelum masuk ke ranah politik anggota dewan. Staf sekretariat berperan sebagai penghubung yang harus memastikan agenda pimpinan dan fraksi tersampaikan secara akurat, sehingga komunikasi tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi juga melalui relasi ketergantungan birokratis-politis.

Pengaruh fraksi memperkuat pola patronase dengan menjadikan fraksi sebagai filter utama pesan politik. Keputusan dan sikap fraksi terhadap isu tertentu akan memengaruhi instruksi yang diterima sekretariat dan orientasi kerja staf. Dalam praktik sehari-hari, komunikasi di DPRD banyak didukung oleh lobi politik dan interaksi informal, seperti komunikasi verbal dan pendekatan personal, yang terbukti mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan dibandingkan prosedur administratif formal.

Budaya politik DPRD juga ditandai oleh adanya ego sektoral antarbagian yang berpotensi menghambat koordinasi. Namun, mekanisme evaluasi rutin dan komunikasi langsung mampu meredam konflik tersebut. Di sisi lain, orientasi sasaran kinerja memberikan kerangka kerja

yang terstruktur, tetapi keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan staf membaca konteks politik dan menyesuaikan cara penyampaian pesan. Secara keseluruhan, kombinasi antara patronase, pengaruh fraksi, dan komunikasi informal membentuk pola komunikasi DPRD Kota Bandung yang adaptif, situasional, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta stabilitas hubungan politik-birokrasi.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pola Komunikasi

Faktor Pendorong

Keberadaan struktur formal yang jelas pimpinan, alat kelengkapan, hingga Sekretariat DPRD sebenarnya memberi jalur komunikasi yang relatif tertata untuk mengalirkan instruksi, agenda persidangan, serta kebutuhan dukungan administratif. Dalam kondisi ideal, keteraturan rantai komando ini membantu memastikan keputusan politik dapat diterjemahkan menjadi pekerjaan teknis yang terukur. Pada praktiknya, struktur ini menjadi pendorong ketika dipakai untuk mempercepat eksekusi, bukan sekadar memperbanyak tahapan persetujuan.

Dokumentasi resmi seperti surat-menyurat, disposisi, risalah rapat, dan arsip produk kebijakan juga berfungsi sebagai pendorong karena menciptakan jejak akuntabilitas. Instrumen ini seharusnya memaksa DPRD bekerja lebih disiplin: apa yang diputuskan harus tercatat, siapa penanggung jawab harus jelas, dan tindak lanjut harus dapat dilacak. Ketika dokumentasi dijalankan konsisten, ruang untuk “lupa”, “tidak tahu”, atau saling lempar tanggung jawab bisa ditekan.

Forum deliberatif di internal DPRD komisi, badan, rapat kerja, dan koordinasi lintas fraksi dapat menjadi penggerak karena menyediakan ruang pertukaran informasi dan penyelarasan posisi. Mekanisme ini penting untuk memperkecil kesenjangan pemahaman antaraktor dan mendorong konsensus minimum agar keputusan tidak berhenti sebagai wacana politik. Jika forum-forum ini dikelola serius, kualitas pengawasan dan legislasi berpeluang meningkat karena argumentasi diuji dan data dikonsolidasikan.

Komunikasi informal yang berjalan di sela mekanisme formal juga dapat mendorong kelancaran kerja, terutama ketika ada kebutuhan respons cepat terkait agenda persidangan, koordinasi protokoler, atau penyiapan bahan rapat. Kanal informal sering menjadi “jalan pintas” ketika prosedur formal terlalu lambat, dan dalam batas tertentu membantu organisasi tetap bergerak. Namun, daya dorong ini hanya sehat bila tetap diarahkan pada kepentingan institusional, bukan menjadi ruang transaksional yang menggerus integritas proses.

Pemanfaatan media digital dan sistem administrasi mulai dari grup koordinasi hingga platform e-office atau sistem pemerintahan digital dapat mempercepat sirkulasi informasi, memperpendek waktu respons, dan meningkatkan keterlacakan dokumen. Dorongan ini signifikan saat DPRD mampu menata informasi dengan disiplin: pesan tidak tercecer, versi dokumen tidak simpang siur, dan pekerjaan tidak bergantung pada kehadiran fisik. Teknologi menjadi pendorong yang nyata hanya jika DPRD memakainya untuk memperbaiki ketepatan kerja, bukan sekadar memindahkan kekacauan manual ke layar ponsel.

Faktor Penghambat

Iklim politik yang kental di lembaga legislatif kerap membuat komunikasi lebih sibuk mengelola citra daripada mengelola substansi. Informasi cenderung diseleksi sesuai kepentingan fraksi atau agenda aktor tertentu, sehingga transparansi internal tidak otomatis menghasilkan keputusan yang lebih bermutu. Dampaknya terasa pada kinerja:

deliberasi bisa ramai, tetapi kedalaman pembahasan dangkal dan tindak lanjut pengawasan sering kehilangan fokus.

Hierarki komunikasi yang panjang terutama ketika akses ke anggota dewan tersentral pada jalur tertentu membuat pekerjaan teknis berjalan tersendat dan rentan distorsi. Ketika staf pendukung harus menunggu "restu" berlapis untuk hal-hal operasional, waktu habis pada administrasi, bukan pada peningkatan kualitas layanan persidangan dan bahan kebijakan. Pola ini memperlihatkan problem manajerial: DPRD tampak bergerak, tetapi output strategisnya terlambat atau tidak konsisten.

Ketimpangan akses informasi antara pimpinan, anggota, dan perangkat sekretariat menciptakan asimetri pengetahuan yang melemahkan koordinasi. Staf sering dituntut siap mengeksekusi tanpa memperoleh konteks yang utuh, sementara anggota dewan menuntut layanan cepat seolah semua variabel sudah tersedia. Situasi ini mudah melahirkan kesalahan administratif, miskomunikasi agenda, serta kualitas dokumen yang naik-turun yang pada akhirnya memantul ke citra kinerja DPRD sendiri.

Ego sektoral dan budaya senioritas dapat memecah aliran informasi menjadi "wilayah-wilayah kecil" yang sulit disatukan. Bagian-bagian bekerja seolah terpisah, mempertahankan otoritasnya masing-masing, dan koordinasi lintas unit menjadi negosiasi yang melelahkan. Jika ini dibiarkan, DPRD menanggung biaya organisasi yang tinggi: rapat bertambah, koordinasi berulang, tetapi hasil kerja tidak semakin efektif.

Pemakaian kanal digital tanpa tata kelola informasi justru memproduksi kebisingan: pesan menumpuk, instruksi ganda, dokumen versi berbeda, dan tindak lanjut tidak jelas. Kecepatan komunikasi berubah menjadi ilusi produktivitas ramai di grup, lambat di eksekusi. Hambatan ini menohok kinerja DPRD karena memperlihatkan kelemahan pengendalian kerja: teknologi seharusnya meningkatkan disiplin organisasi, tetapi yang tampak adalah rendahnya kepatuhan pada prosedur komunikasi yang rapi dan akuntabel.

KESIMPULAN

Analisis Pola Komunikasi Pemerintahan: Studi Kasus DPRD Kota Bandung 2025 menegaskan bahwa komunikasi internal merupakan fondasi utama bagi efektivitas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Melalui kerangka teori Pace & Faules, penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur komunikasi seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, komunikasi ke atas, serta pengambilan keputusan partisipatif menjadi variabel kunci yang menentukan kualitas koordinasi antarpelaku politik dan birokrasi. Dinamika komunikasi internal DPRD Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan, kultur politik, dan peran administratif Sekretariat DPRD (Setwan), yang secara kolektif membentuk pola interaksi baik secara vertikal maupun horizontal.

Dari sisi komunikasi vertikal, penelitian memperlihatkan bahwa aliran instruksi, koordinasi, serta mekanisme pengawasan dari pimpinan DPRD ke Setwan dan unit-unit teknis sangat bergantung pada stabilitas kepercayaan antartingkat organisasi. Kepercayaan menjadi prasyarat penting bagi kelancaran arus informasi dalam struktur yang hierarkis dan politis. Tantangan seperti ketimpangan akses informasi, ego sektoral, dan sensitivitas politik menuntut adanya strategi komunikasi interpersonal yang mampu mereduksi potensi distorsi pesan. Dalam konteks ini, komunikasi formal melalui surat, rapat, dan evaluasi rutin berjalan berdampingan dengan komunikasi informal sebagai sarana menjembatani kesenjangan struktural.

Komunikasi horizontal di DPRD Kota Bandung menunjukkan bahwa proses deliberasi dan negosiasi antaranggota komisi serta antarfraksi merupakan ruang utama pembentukan keputusan partisipatif. Setiap aktor membawa orientasi politik, kepentingan partai, serta perspektif administratif yang berbeda, sehingga komunikasi lintas fraksi memerlukan

pendekatan kolaboratif dan fleksibel. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Setwan memainkan peran vital sebagai mediator administratif yang memastikan kelancaran koordinasi teknis, terutama dalam proses penyusunan Raperda, pengolahan pokok-pokok pikiran, dan sinkronisasi agenda kerja. Keputusan politik pada akhirnya merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur formal, dinamika politik, dan dukungan teknokratis birokrasi.

Dalam hubungan DPRD–Setwan, keterbukaan dan transparansi informasi menjadi faktor lain yang sangat menentukan efektivitas lembaga. Mekanisme surat-menyurat, dokumentasi notulensi, serta digitalisasi melalui e-office dan WhatsApp internal berperan penting dalam memastikan akuntabilitas dan percepatan arus informasi. Namun, penelitian juga menyoroti hambatan struktural seperti birokrasi berlapis, ketidaksinkronan antarbagian, serta literasi digital yang tidak merata yang dapat memperlambat koordinasi. Dengan demikian, kualitas komunikasi kelembagaan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola teknologi, memperpendek rantai koordinasi, dan membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif.

Akhirnya, kami mencoba mempertegas bahwa pola komunikasi di DPRD Kota Bandung tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh budaya politik yang melingkupinya, termasuk patronase, lobi informal, dan negosiasi strategis. Budaya politik tersebut membentuk cara staf membaca situasi, menentukan prioritas, dan menyampaikan pesan sesuai konteks politik yang berkembang. Orientasi sasaran kinerja memberikan kerangka kerja formal bagi Setwan, tetapi komunikasi informal justru menjadi penggerak penting dalam menyelaraskan kepentingan politik dan teknokratis. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas DPRD Kota Bandung sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola interaksi politik dan birokratis melalui pola komunikasi yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada kolaborasi kelembagaan.

REFERENSI

Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.

Bungin, B. (2017). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi dalam Kehidupan Politik dan Pemerintahan*. Kencana.

Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Fadillah, R. (2018). *Eksistensi Media Online Terhadap Pemasaran Media Cetak Haluan Riau,* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Fetni, F., Fait, T., & Aslim, L. O. (2024). *Komunikasi organisasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Distrik Sentani Jayapura*. Journal Public Uho, 7(2). https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.437.

Fiantika, F. R. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Kumara. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Ahmad Dahlan.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara.

Sedarmayanti. (2020). *Reformasi Administrasi Publik dan Digitalisasi Birokrasi*. Refika Aditama.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Supriadi, Y. (2017). Komunikasi politik DPRD dalam meningkatkan peran legislatif di Kota Bandung. *Mediator: Jurnal Komunikasi, 10*(1), 25–36. https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2119.

Zhahara Yusra. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19, *Journal Lifelog Learning*, 4 (1), hlm. 18.